

**ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA RAHTAWU KECAMATAN  
GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**Amelia Dwi Anggraini, Satria Aji Imawan**

**Program Studi S-1 Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024)7465405  
Laman : [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id)  
Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

---

**ABSTRACT**

*This study explain the implementation of collaborative governance in the development of Rahtawu Tourism Village using the collaborative dynamics framework of Emerson and Balogh and the collaboration success factors proposed by Mattessich and Monsey. The findings indicate that collaborative governance in Rahtawu Village has not been optimally implemented. In the collaborative dynamics aspect, shared principles, shared motivation, and joint capacity for action remain constrained by differences in actors' perspectives and limited human resource capacity. Nevertheless, transparency and face-to-face dialogue facilitated through BUMDes, village deliberation forums, and village development planning meetings have gradually fostered shared goals oriented toward community welfare and village self-reliance. Collaborative actions are reflected in MSME assistance programs, tourism village socialization, comparative studies, and cultural events. The impacts of collaboration are evident in improved village economic performance, institutional strengthening, and the development of local-based business units. From Mattessich and Monsey's perspective, environmental support, shared goals, communication, organizational structure, membership, and resources generally support collaboration, although human resource limitations remain a key challenge.*

**Keywords: Collaborative Governance, Tourism Village Development**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Rahtawu dengan merujuk pada kerangka dinamika kolaborasi dari Emerson dan Balogh serta faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattessich dan Monsey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* di Desa Rahtawu belum berjalan secara optimal. Pada aspek dinamika kolaborasi, penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama sebagaimana dikemukakan Emerson dan Balogh masih menghadapi kendala berupa perbedaan cara pandang antaraktor dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, keterbukaan informasi dan dialog tatap muka melalui fasilitasi BUMDes, musyawarah desa, dan musrenbangdes mulai membentuk tujuan bersama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tindakan kolaboratif diwujudkan melalui pendampingan UMKM, sosialisasi desa wisata, dan penyelenggaraan event budaya. Dampak kolaborasi terlihat pada peningkatan ekonomi desa dan penguatan kelembagaan. Berdasarkan perspektif Mattessich dan Monsey, faktor lingkungan, tujuan bersama, komunikasi, struktur, keanggotaan, dan sumber daya telah mendukung kolaborasi, meskipun kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pengembangan Desa Wisata

## PENDAHULUAN

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, desa memiliki peran strategis sebagai basis pengembangan potensi lokal, baik berupa sumber daya alam, budaya, maupun kearifan lokal. Salah satu bentuk implementasi pemanfaatan potensi tersebut adalah melalui pengembangan desa wisata yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.

Secara nasional, sektor pariwisata menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menegaskan bahwa pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan. Di tingkat daerah, pemerintah juga активно

mendorong pengembangan desa wisata melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Hingga tahun 2024, jumlah desa wisata di Jawa Tengah mencapai 886 desa dengan berbagai kategori perkembangan

No.	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Rintisan	337	409	583	681
2.	Berkembang	94	110	159	167
3.	Maju	31	34	34	38
4.	Non Kriteria	255	265	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>717</b>	<b>818</b>	<b>776</b>	<b>886</b>

Sumber: Disporapar Prov. Jawa Tengah (2024)

**Gambar 1.1 Data Desa Wisata di Jawa Tengah**

Kabupaten Kudus sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah turut mengembangkan desa wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Jumlah desa wisata di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari 15 desa pada tahun 2019 menjadi 30 desa pada tahun 2023.

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Wisata	15	28	28	28	30
Jumlah Desa	123	123	123	123	123
Persentase	12,1	22,7	22,7	22,7	24,3

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus

**Gambar 1.2 Data Desa Wisata Kabupaten Kudus, 2023**

Meskipun demikian, peningkatan jumlah desa wisata tidak selalu diikuti dengan optimalnya pengelolaan dan pengembangan di setiap desa. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi besar namun belum berkembang secara optimal adalah Desa Wisata Rahtawu di Kecamatan Gebog. Desa ini memiliki daya tarik berupa wisata alam dan perkebunan kopi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, dalam proses pengembangannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti rendahnya keterlibatan aktor dan kurangnya pemahaman pengelola terhadap fungsi BUMDes, Selain itu, partisipasi masyarakat juga belum maksimal, sehingga pengelolaan desa wisata belum berjalan secara optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk

digunakan dalam menganalisis pengembangan desa wisata. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, transparan, dan berorientasi pada tujuan bersama.

Dalam kerangka *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti komunikasi, kepercayaan, komitmen, serta kapasitas sumber daya. Model *Collaborative Governance Regime* yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh menekankan tiga elemen utama, yaitu *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga elemen tersebut menjadi kunci dalam memahami dinamika kolaborasi antar aktor dalam pengembangan desa wisata.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Rahtawu serta mengidentifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait tata kelola kolaboratif dalam pembangunan pariwisata berbasis desa

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Administrasi Publik**

Administrasi publik merupakan bidang ilmu yang mempelajari pelaksanaan kebijakan pemerintah serta berbagai aktivitas lembaga publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik mencakup proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik pada berbagai tingkatan pemerintahan

Menurut Nicholas Henry, administrasi publik adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sementara itu, Chandler dan Plano memandang administrasi publik sebagai proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya serta

personel publik untuk memformulasikan dan mengelola kebijakan publik

Lebih lanjut, administrasi publik juga dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan *integrated public governance*, yaitu integrasi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai tata kelola yang baik.

Dalam perkembangannya, administrasi publik mengalami perubahan paradigma, mulai dari paradigma birokrasi tradisional hingga paradigma *good governance*. Paradigma *good governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan kebijakan serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat. Paradigma ini menjadi dasar penting dalam memahami pendekatan kolaboratif dalam sektor publik

## **b. Manajemen Publik**

Manajemen publik merupakan bagian dari administrasi publik yang berfokus pada pengelolaan organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Manajemen publik mencakup berbagai fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Stoner, manajemen publik adalah suatu upaya komprehensif yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia

Sementara itu, Koontz dan Wehrich mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian tujuan melalui dan bersama orang lain. Manajemen publik juga dipahami sebagai suatu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek manajerial dan aspek politik dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor publik tidak hanya berorientasi

pada efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan dinamika kepentingan dan kebijakan

Selain itu, manajemen publik mencakup pengelolaan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan sarana prasarana dalam organisasi pemerintah. Dengan demikian, manajemen publik berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif.

## **c. Collaborative Governance**

Emerson (2012) mendefinisikan Collaborative Governance dijelaskan sebagai struktur dan proses dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pihak pemerintah maupun nonpemerintah, serta sektor swasta. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat terlaksana melalui lembaga negara semata. Astuti et al., 2020; Emerson et al., 2012 menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari dinamika kolaborasi,

Tindakan kolaborasi, dan dampak pada proses kolaborasi.

### 1. Dinamika kolaborasi

Beberapa ilmuwan menjelaskan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari definisi masalah menuju seting agenda hingga implementasi. Emerson (2012) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif.

Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi.komponen tersebut yaitu: penggerakan prinsip bersama *principle engagement*, Merupakan proses keterlibatan aktor melalui dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk membangun pemahaman bersama. Proses ini mencakup identifikasi masalah, pertukaran informasi, serta perumusan tujuan bersama dalam kolaborasi.

Motivasi bersama *shared motivation*, Menggambarkan kondisi hubungan antaraktor yang ditandai oleh adanya kepercayaan (*trust*), komitmen, dan rasa saling memiliki

terhadap tujuan kolaborasi. Elemen ini menjadi dasar penting dalam menjaga keberlanjutan kerja sama. dan kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama *capacity for joint action*, Menunjukkan kemampuan para aktor dalam melaksanakan tindakan bersama yang didukung oleh ketersediaan sumber daya, kepemimpinan, serta struktur kelembagaan yang memadai. (Astuti, 2020).

### 2. Tindakan Kolaborasi

Berbagai tindakan dalam proses kolaborasi dapat muncul dalam bentuk kegiatan, diskusi, ataupun bentuk interaksi lainnya. Keberagaman ini mencerminkan dinamika yang hidup di dalam suatu kolaborasi. Baik atau buruknya setiap tindakan sangat bergantung pada sejauh mana para aktor atau individu yang terlibat mampu memahami dan membangun dinamika kolaborasi secara tepat.

Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya memberi dampak langsung atau sementara, tetapi juga akan memengaruhi perkembangan dan arah kolaborasi dalam jangka

panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk menyadari bahwa setiap langkah yang diambil memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan dan kualitas kerja sama.

### 3. Dampak dan Adptasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang teru 31 berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor

kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata Di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabuoaten Kudus*

#### A. Dinamika Kolaborasi

*Collaborative Governance* dalam pengembangan Desa Wisata Di Desa Rahtawu pada aspek dinamika kolaborasi menunjukkan bahwa kerja sama antaraktor telah berjalan secara relatif membangun dan terstruktur. Kolaborasi ini ditopang oleh keterbukaan informasi baik di tingkat antarinstansi maupun di tingkat desa melalui tata kelola BUMDes yang transparan.

Selain itu, keberadaan ruang dialog kolektif seperti musyawarah desa, musrenbangdes, dan forum koordinasi lintas aktor berperan penting dalam membangun kesepahaman, menyelaraskan kepentingan, serta memperkuat

hubungan antar pemangku kepentingan. Dinamika kolaborasi juga ditandai oleh terbentuknya motivasi dan tujuan bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa, dan perluasan daya tarik Desa Wisata Rahtawu, meskipun proses pembentukannya menghadapi tantangan terutama terkait perbedaan cara pandang dan kesiapan sumber daya manusia pada tahap awal.

Di sisi lain, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama diperkuat oleh keberadaan regulasi formal berupa Peraturan Desa Rahtawu Nomor 2 Tahun 2024, peran kepemimpinan yang fasilitatif, serta kontribusi sumber daya yang saling melengkapi dari berbagai pihak.

## **B. Tindakan Kolaborasi**

*Collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Rahtawu pada aspek tindakan kolaborasi telah terwujud secara nyata melalui implementasi program secara bersama, seperti pelatihan peningkatan kapasitas SDM, pendampingan UMKM, sosialisasi

desa wisata, studi banding, serta partisipasi dalam lomba desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya berhenti pada tahap dialog dan kesepahaman, tetapi telah bertransformasi menjadi aksi bersama yang terkoordinasi lintas sektor.

Tindakan kolaborasi tersebut didukung oleh kerangka regulasi melalui Perdes Desa Rahtawu, peran kepemimpinan yang mengarahkan dan mengoordinasikan aktor, serta kontribusi sumber daya yang saling melengkapi. Meskipun masih terdapat keterbatasan kapasitas pada beberapa aspek, kolaborasi yang terbangun telah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendorong pengembangan desa wisata secara lebih terarah dan berkelanjutan.

## **C. Dampak dan Adaptasi**

Aspek dampak pengembangan Desa Wisata Rahtawu menunjukkan perubahan yang mulai terlihat baik secara ekonomi, kelembagaan, maupun pengembangan unit usaha desa. Dampak ekonomi tercermin dari meningkatnya retribusi wisata, pendapatan BUMDes, serta

bertambahnya kunjungan wisatawan yang membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata. Selain itu, dampak kolaborasi juga terlihat dari berkembangnya berbagai unit usaha berbasis potensi lokal seperti agrowisata, petik sayur, budidaya ikan, pasar gunung, serta event budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada *diversifikasi* ekonomi dan keterlibatan masyarakat.

Pada aspek adaptasi, kolaborasi ditandai oleh adanya perumusan strategi melalui forum koordinasi lintas instansi serta pelembagaan strategi dalam instrument formal seperti Perdes, AD/ART BUMDes, dan musyawarah desa. Sebagian aktor, seperti PT. Kreatif Cipta Mulia, bahkan mulai merencanakan pendekatan berbasis program dan indeks kinerja sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan. Namun, prose adaptasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kapasitas pengelolaan sumber daya dan internalisasi strategi di tingkat

pelaksana, sebagaimana terlihat dari persepsi Pokdarwis yang menilai strategi bersama belum sepenuhnya jelas.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan desa wisata di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Rahtawu. Pertama, dukungan lingkungan (**environmental support**) yang relatif kondusif. Hal ini ditandai dengan adanya regulasi dan dukungan dari pemerintah, baik di tingkat desa maupun daerah, yang memberikan legitimasi terhadap pengembangan desa wisata. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong menjadi modal sosial yang memperkuat kolaborasi antaraktor.

Kedua, komunikasi yang intensif antaraktor. Keberadaan forum-forum seperti musyawarah desa, forum

selapanan, dan pertemuan rutin mingguan menjadi sarana penting dalam membangun interaksi, koordinasi, serta pertukaran informasi. Forum ini menciptakan ruang dialog yang memungkinkan para aktor untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama.

Ketiga, tujuan bersama (*shared goals*) yang jelas. Para aktor memiliki kesamaan tujuan dalam mengembangkan desa wisata sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesamaan tujuan ini menjadi dasar dalam memperkuat komitmen dan kerja sama antar pihak.

Keempat, keterlibatan multiaktor yang cukup beragam, meliputi pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, serta pihak swasta. Keberagaman aktor ini memungkinkan adanya pembagian peran dan kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Kelima, modal sosial masyarakat, seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap desa. Modal sosial ini menjadi faktor penting dalam membangun *shared motivation*

yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi.

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan *collaborative governance*. Pertama, ketimpangan partisipasi antaraktor. Tidak semua pihak terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan atau forum kolaborasi. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya inklusif.

Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Ketiga, keterbatasan kapasitas teknis, terutama dalam pengelolaan pariwisata yang profesional. Beberapa aktor masih membutuhkan peningkatan kemampuan dalam aspek manajerial, promosi, dan pengelolaan destinasi wisata.

Keempat, inkonsistensi komitmen sebagian aktor. Dalam praktiknya, terdapat aktor yang belum

sepenuhnya konsisten dalam berpartisipasi, baik karena keterbatasan waktu, kepentingan pribadi, maupun faktor lainnya.

Kelima, belum optimalnya struktur dan pembagian peran. Meskipun sudah terdapat pembagian tugas, namun masih bersifat fleksibel dan belum sepenuhnya terstruktur dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Rahtawu telah berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi ini menunjukkan adanya upaya bersama dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa secara partisipatif.

Ditinjau dari dinamika kolaborasi, aspek *principled engagement* telah tercermin melalui adanya forum-forum komunikasi seperti musyawarah desa dan

pertemuan rutin yang menjadi ruang interaksi antaraktor. Aspek *shared motivation* juga relatif kuat, ditunjukkan oleh adanya kepercayaan, komitmen, serta dukungan modal sosial berupa budaya gotong royong. Sementara itu, aspek *capacity for joint action* telah terbentuk melalui pembagian peran antaraktor, meskipun masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan kapasitas teknis.

Lebih lanjut, terdapat faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan kolaborasi, antara lain lingkungan yang kondusif, komunikasi yang intensif, tujuan bersama, serta keterlibatan multiaktor. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat, seperti ketimpangan partisipasi, keterbatasan sumber daya, kapasitas teknis yang belum optimal, serta belum terstrukturanya pembagian peran secara jelas.

Dengan demikian, keberhasilan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Rahtawu dipengaruhi oleh keseimbangan antara dinamika kolaborasi dan faktor-faktor yang

melingkupinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aktor, penguatan partisipasi, serta penataan struktur kolaborasi yang lebih jelas agar pengembangan desa wisata dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Rahtawu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi.

1. Peningkatan partisipasi aktor perlu dilakukan dengan mendorong keterlibatan yang lebih merata dari seluruh pihak dalam setiap forum kolaborasi. Pemerintah desa dapat mengoptimalkan forum yang sudah ada, seperti musyawarah desa dan pertemuan rutin, agar tidak hanya menjadi ruang formal, tetapi juga mampu meningkatkan keterlibatan aktif seluruh aktor.
2. penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting, terutama dalam pengelolaan desa wisata secara profesional. Pelatihan

dan pendampingan dalam bidang manajemen pariwisata, promosi digital, serta pengelolaan destinasi perlu ditingkatkan agar aktor lokal memiliki kemampuan yang lebih memadai.

3. Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya perlu dilakukan melalui optimalisasi peran BUMDes serta penguatan kerja sama dengan pihak swasta. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan dan keberlanjutan program pengembangan desa wisata.
4. Penataan struktur dan pembagian peran yang lebih jelas antaraktor perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Kejelasan peran akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
5. Penguatan komitmen dan kepercayaan antaraktor harus terus dijaga melalui komunikasi yang intensif dan transparan. Hal ini penting untuk mempertahankan *shared motivation* dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Yoeti, oka. dkk (2006). Pariwisata Budaya Masalah dan Solusinya. PT. Pratnya

- Paramita
- Abdussamad Zuchri. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In Rapanna Patta (Ed.), *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed., pp. 99–106). syakir media press.
- Ahmadi, R., Asad, M. A., & Dema, H. (2025). Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(2).
- Ambarini, N. S. B., Septaria, E., & Yamani, M. (2023). *Tourism Village Management by Village Owned Enterprises in Business Legal Perspective*. 1268–1282. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7\\_129](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_129)
- Ansell and Gash grand theory (2008) *COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY. International Journal of Social Science*, 3(4), 403–410. <https://doi.org/10.53625/ijss.v3i4.6988>
- Efendi aji muhamad. (2023). *ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA RAHTAWU KECAMATAN GEBOG*
- Emmerson, K, Nabatchi, T dan Balogh, S. (2011). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.22, hal.1-29. <https://doi.org/0.1093/jopart/mur011>
- Ervina, A. (2018). Konsep Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 5(2), 45-52.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). Perencanaan Pembangunan Pariwisata Pedesaan. *Kawistara*, 2(3), 48-55.
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In Abadi Husnu (Ed.), *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed., pp. 115–174). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Husna Asmaul, & Suryana Budi. (2017). Metodologi Penelitian dan Statistik. In Said Asnah, Santoso Budi, & Sosiawan Andy (Eds.), *Metodologi Penelitian dan Statistik* (1st ed., p. 65). Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan..
- Laasch, O. (2018). Beyond the purely commercial business model: Organizational value logics and the heterogeneity of sustainability business models. *Long Range Planning*, 51(1), 158–183. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.09.002>
- Lisa, A. (2025). *MODEL KOLABORASI AKTOR PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI PEMERINTAH*

- LOKAL* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG)..
- Lubis, H., Rohmatillah, N., & Rahmatina, D. (2020). STRATEGY OF TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT BASED ON LOCAL WISDOM. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 320. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.22385>
- Lukmana, I., Susanti, H. W., Anggri, Y., Kurniawan, P., & Pramandaru, A. (2024). Analysis Of Tourism Villages Sustainability Managed By Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Migration Letters Analysis Of Tourism Villages Sustainability Managed By Village-Owned Enterprises (BUM Desa). *ResearchGate*, 21, 918–920. [www.migrationletters.com](http://www.migrationletters.com)
- Mafaza, A., & Setyowati, K. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA*. *Jurnal kebijakan publik*, 11,7. [www.balkondes.borobudur.ht](http://www.balkondes.borobudur.ht) [tps://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.09.002](https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.09.002)
- Miles B. Matthew, Huberman Michael A., & Saldana Johnny. (2014). *Qualitative-Data-Analysis* (salmon helen, perry kaitlin, koscielak kalie, & barret laura, Eds.). SAGE Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Purwanto, S. (2022). Analyzing the Role of Local Government in Tourism Village Development: An Empirical Investigation from Kampung Wisata Payo. In *Proceedings of the International Academic Conference on Tourism (INTACT) "Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions"* (INTACT 2022) (pp. 455–461). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-73-2\\_32](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-73-2_32)
- Putra Pratama, A., Anshar, M., & Hidayat, Y. (2021). The Tourism Village Development Strategy Through Community Empowerment In Tiwingan Lama Village, Aranio District, Banjar Regency. *Saudi J Econ Fin*, 5(7), 277–282. <https://doi.org/10.36348/sjef.2021.v05i07.004>
- Putri, A. K., & Surya, B. (2018). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat.
- Rahmawati, D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat melalui Konsep Desa Wisata. *Jurnal Pariwisata*, 4(2), 22-30.
- Ramadhani, S., & Syafriyani, I. (2025, February). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum Di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 2, No. 1, pp. 177-192).

- Ratna Susanti, Suci Purwandari, & Basnendar Herry Prilosadoso. (2023). SUSTAINABLE TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT THROUGH STRENGTHENING
- Rustiyani, N. (2021, Maret 07). *Betanews*. From Betanews.id: <https://betanews.id/2021/03/desa-temulus-kembangkan-wisata-air-yang-dilengkapi-spot-foto-menarik.html>
- Siyoto Sandu, & Sodik Ali. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. In Ayup (Ed.), *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Literasi Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- sutono anang, Sumaryadi, & rahtomo wisnu. (2023). The Role of Bumdes (Village-Owned Enterprises) in Strengthening the Tourism Village Business Ecosystem: Sumberbulu Tourism Village Case Study. *Archives of Business Research*, 11(4). <https://doi.org/10.14738/abr.14.14348>
- Suwarti, S., & Yuliamir, H. (2017). Pengembangan Daya Tarik Wisata Desa Wisata Kampung Keji Sebagai Atraksi Wisata Guna Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Semarang. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 13(1). <http://ejournal.stipram.net>
- Udhma, N. S. (2023, November 16). *Lokadata*. From Kanaldesa: <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-utama-karya-rahtawu-serius-kelola-wisata-cuan-hingga-ratusan-juta>
- Udhma, n. s. (2022, agustus 27). *lokadata*. From kanaldesa: <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-hidupkan-kembali-wisata-wonosoco-yang-sempat-mati-suri>
- Udhma, N. S. (2023, November 16). *lokadata*. From kanaldesa.com: <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-utama-karya-rahtawu-serius-kelola-wisata-cuan-hingga-ratusan-juta>
- udhma, N. S. (2023, Oktober 07). *Lokadata*. From Kanal Desa: <https://kanaldesa.com/artikel/bumdes-japan-memasarkan-kopi-sampai-merintis-ekosistem-wisata-alternatif-di-kawasan-muria>
- Yulistiyono, H., & Pambudi, S. (2022). THE ROLE OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDesa) IN THE DEVELOPMENT OF HALAL TOURISM IN MADURA. *International Conference on Business & social Sciences*, 797–799.
- Zulaikhah, S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Rahtawu ... Pengembangan Desa Wisata Rahtawu dalam Membentuk Wisata Berkelanjutan dan Bersaing Melalui Sistem Kolaborasi (Pemerintah dan Masyarakat). *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 04, 58–59.